

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Konteks Penelitian**

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara didunia, salah satunya di Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang dan penyebabnya. Bahkan, di beberapa kota besar di Indonesia pun menunjukkan gejala kemiskinan yang terus menerus memburuk. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Terlebih lagi di Indonesia permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah Indonesia saat ini, walaupun bukan berarti masalah-masalah yang lain disampingkan.

Kemiskinan adalah saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan Kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang Panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri. Dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai

macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, yang artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Mengingat hal tersebut, Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas nasional pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Agenda tersebut dijalankan dengan strategi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja antar-pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam prioritas nasional peningkatan kesejahteraan sosial tahun 2020, pemerintah menitikberatkan pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata bagi 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Upaya ini dilakukan melalui:

- (1) pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran;
- (2) pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- (3) perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang di buat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Maka dengan adanya implementasi terdapat program SLRT. Sistem Layanan Rujukan Terpadu adalah program layanan sosial yang berfokus untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, sistem layanan satu pintu ini yang membantu mencari tahu kebutuhan rakyat miskin dan rentan tersebut lalu mengikutsertakan mereka pada program pemerintah terkait perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan tersebut tetapi masyarakat tersebut harus terdaftar di daftar penerima manfaat (DPM).

Ada beberapa program berskala nasional yang dijalankan untuk mendukung upaya tersebut antara lain program bantuan sosial pangan yang terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang saat ini bernama Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Program Listrik bagi Masyarakat Miskin. Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan, dan penciptaan lapangan kerja baru. Di tingkat daerah

daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal berhulu pada kurangnya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial. Masih banyak program pelayanan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu. Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, dengan memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya untuk mengikutsertakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Sistem ini membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkan mereka dengan program-program Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Dengan demikian penempatan

SLRT di Kabupaten atau Kota, diharapkan sebagai lini terdepan (front line) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

Berdasarkan Narasi RPJMN 2020-2024, pada 2024 diproyeksikan persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan SLRT untuk penanggulangan kemiskinan mencapai 100 (seratus) persen. Sehingga ke depan, SLRT dapat memberikan pelayanan yang inklusif dan bermutu guna menjamin keberlanjutan dan pengembangan SLRT. Pelaksanaan SLRT diharapkan membantu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada RPJMN, SLRT menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Sistem ini diterapkan pula oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagai alat meminimalisir tingkat kemiskinan di Kota Bandung melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Peningkatan Warga Miskin dan Orang Tidak Mampu. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) membantu mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan warga miskin dan rentan miskin, yang kemudian menghubungkannya dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah dan non-pemerintah di pusat dan daerah,

yang mengartikan bahwa SLRT merupakan layanan satu pintu untuk penanggulangan kemiskinan.

SLRT sendiri menjadi suatu alasan dalam mengoptimalkan program-program perlindungan sosial dan penanggulangabn kemiskinan yang tidak efektif, efisien, serta tidak konferhensif, dimana hal ini terjadi akibat fragmentasi horizontal dan vertical, data statis dan belum adanya standarisasi mekanisme penetapan sasaran, cakupan dan pendanaan program yang masih minim dan terbatas, serta penjangkauan yang terbatas.

Melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan merupakan sebuah lembaga yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan Sebagian persoalan kedinasan di aspek kemasyarakatan berlandaskan otonomi daerah. Seperti halnya perumusan kebijakan di bidang sosial, penagwasan dan penyelenggaraan kebijakan yang dipercayakan oleh wali kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari dinas sosial.

Dinas sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mempunyai peran utama dan fungsi menyediakan fasilitas layanan kepada masyarakat yang berfokus dalam penanggulangan kemiskinan dan sosial oleh para pegawai di Dinas Sosial Kota Bandung. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dinilai masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sehingga berbagai program bisa di implementasikan menjadi lebih aktif.

Menyoroti permasalahan mengenai penanganan kemiskinan di Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler menjadi salah satu kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Kota Bandung. Kecamatan Bojongloa Kaler berdasarkan terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 5 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Jamika dengan jumlah penduduk 31.893 jiwa, Kelurahan Babakan Trogong dengan jumlah penduduk 24.258 jiwa, kelurahan Babakan Asih dengan jumlah penduduk 14.729, Kelurahan Kopo dengan jumlah penduduk 28.159, dan yang terakhir Kelurahan Sukaasih dengan jumlah penduduk 20.960, dengan laporan data kesejahteraan warga menggunakan parameter tahapan keluarga sejahtera (KS) dengan jumlah total pra KS mencapai 1.785 kepala keluarga (KK) serta data penerimaan program beras miskin (raskin) sebanyak 1.139 KK. Sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi, Bojongloa Kaler memiliki beberapa masalah mendasar terkait sumber daya manusia (SDM). Ragam masalah ini kita temukan di banyak bidang, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

Dari penjabaran di atas terdapat gambar data penduduk kecamatan bojongloa kaler berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020.

NO	KELURAHAN	LAKI-LAKI (Jiwa)	PEREMPUAN (Jiwa)	JUMLAH (Jiwa)
1.	JAMIKA	16.267	15.626	31.893
2.	BABAKAN TAROGONG	12.411	11.847	24.258
3.	BABAKAN ASIH	7.566	7.163	14.729
4.	KOPO	13.843	15.316	29.159
5.	SUKAASIH	10.721	10.239	20.960
<b>JUMLAH</b>		<b>60.808</b>	<b>60.191</b>	<b>120.999</b>

**Gambar 1.1**

**Data Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler 2020**

**Sumber: bps.go.id**

Dari data diatas kepadatan penduduk di kecamatan bojongloa kaler sangat padat apalagi pada Kelurahan Jamika yang mencapai predikat Kawasan terpadat di Provinsi Jawa Barat dengan kepadatan penduduk 3m per jiwa.

Salah satu parameter yang bisa kita cermati adalah data tentang tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduknya. Yang mengejutkan, kelompok terbesar ada di warga yang tidak atau belum bersekolah. Jumlahnya mencapai 29.400 jiwa. Menyusul di bawahnya, kelompok lulusan SMP dengan jumlah 19.114 jiwa dan kelompok lulusan SD sebanyak 16.391. Jumlah warga yang tidak lulus SD juga relatif banyak, yakni 13.725 jiwa. Untuk urusan kesehatan, berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, diketahui persentase balita stunting di Bojongloa Kaler adalah 11,50 persen atau sejumlah 458 bayi. Persentase bayi stunting di kecamatan ini menjadi terbanyak ketiga se-Kota Bandung, di bawah Lengkong dan Cibiru.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dan pernyataan diatas, peneliti memiliki ketertarikan terhadap permasalahan dan penemuan yang ada dilapangan. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung”***.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Kebijakan sebagai upaya dalam meminimalkan program SLRT di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Fokus penelitian bersifat tentative sesuai dengan berlangsungnya penelitian.

Menurut George C. Edward III (1980:1) ada empat dimensi proses mendukungnya implementasi kebijakan, antara lain :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Teori tersebut cocok untuk dijadikan pisau analisis permasalahan yang peneliti dapatkan di lapangan dan teori tersebut memiliki kesesuaian dengan masalah yang peneliti dapatkan di lapangan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?

2. Apa yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojongloa Kaler.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga memiliki kegunaan yang bersifat praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam penerapan sistem layanan rujukan terpadu ini.
2. Manfaat secara praktis, dapat menjadi informasi tambahan bagi warga di kecamatan bojongloa kaler dan memberikan kontribusi dalam penerapan implementasi kebijakan SLRT ini.